

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tahta Suci Vatikan diakui sebagai salah satu negara berdaulat dan subyek hukum internasional sejak tahun 1929 melalui Traktat Lateran. Akan tetapi, rekognisi akan diplomasi yang dijalankan Vatikan sejatinya telah muncul sejak tahun 1815 melalui Vienna Protocol yang menempatkan para *nuncio* setara dengan duta besar berdasarkan hukum internasional (Chao, 2000: 38). Begitu pula dengan Konvensi Wina 1959 yang memberikan kekuatan Vatikan untuk melakukan perjanjian internasional sebagai negara berdaulat yang setara. Beberapa rekognisi tersebut menandai keterbukaan Vatikan sebagai negara hingga kini telah membangun hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara di seluruh penjuru dunia. Hubungan diplomatik itupun hadir dalam bentuk misi diplomatik permanen yang berbentuk misi terakreditasi serta misi non-residensial (Vatican.va, t.t). Salah satu pola hubungan diplomatik yang menarik untuk dibahas dalam aktivitas internasional Vatikan adalah komitmen diplomatiknya untuk terhubung dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Kehadiran diplomasi Vatikan di kawasan Timur Tengah sendiri muncul melalui dasar diplomasi Vatikan yang menekankan kepentingan hak asasi manusia, promosi tatanan internasional, serta pembangunan hubungan persahabatan antar semua bangsa dan bukannya kepentingan ekonomi dan politik. Oleh karena itu, Vatikan tidak hanya berfokus pada hubungan diplomatik dengan negara-negara mayoritas penduduk Katolik, melainkan turut membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara berpenduduk mayoritas agama lain (Chao, 2000: 49). Kawasan Timur Tengah sendiri menjadi konsen besar aktivitas diplomatik Vatikan karena besarnya potensi terganggunya hak-hak agama dan sipil umat Katolik, upaya membukaan akses terhadap situs-situs keagamaan di Timur Tengah yang rawan konflik, serta pembangunan otonomi bagi institusi Katolik di tengah dominasi negara Islam (Perko, 2001: 29).

Namun, intensitas diplomatik ini semakin menurun usai kepemimpinan Vatikan mulai lebih mengarahkan perhatiannya pada kepentingan internal keagamaan negara. Kebebasan diplomasi Vatikan juga dibatasi doktrin dalam Perjanjian Lateran 1929 yang menegaskan Vatikan sebagai negara kota yang netral dan tidak memihak dalam situasi konflik kemanusiaan. Sementara itu,

keanggotaan Vatikan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun seringkali dianggap ambigu karena statusnya yang bukan merupakan anggota penuh sejak dibubarkannya Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Akan tetapi, Vatikan sendiri urung absen dalam agenda internasional kemanusiaan PBB. Pada sisi lain, pada periode pasca kolonial, mulai hadir negara-negara merdeka baru, khususnya di kawasan Afrika dan Asia yang membawa nilai antikolonial. Hal tersebutlah yang membuat *microstate* tersebut sempat mengalami stagnansi diplomatik akibat sulitnya menjangkau ideologi dan pola hubungan internasional dari negara-negara baru tersebut (Chao, 2000: 41).

Namun arah diplomasi Tahta Suci Vatikan mulai kembali terlihat usai kenaikan Paus Fransiskus di tahun 2013. Sebagai kepala negara sekaligus pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus memiliki tendensi untuk menghidupkan kembali diplomasi aktif Vatikan era Paus John Paulus II yang berkontribusi besar dalam berakhirnya Perang Dingin. Arah diplomatik Vatikan di masa Paus Fransiskus –yang merupakan Paus pertama asal negara Selatan, Argentina– pun secara khusus ditekankan pada perlindungan umat Kristen-Katolik dan perbaikan hubungan antar agama di Timur Tengah. Oleh karena itu, pengamat politik Italia dan penulis buku terkait Vatikan, Massimo Franco, meyakini bahwa arah diplomasi Vatikan di bawah Paus Fransiskus akan condong ke wilayah Selatan (Reuters, 2015).

Dalam konteks salah satu wilayah Selatan, yakni Timur Tengah, asumsi tersebut salah satunya muncul melalui langkah Vatikan dengan menandatangani kesepakatan pertama dengan Palestina pada Juni 2015, setelah secara normatif mengakui kedaulatan Palestina pada Februari 2013. Hal tersebut hampir secara langsung menimbulkan reaksi penolakan dari Israel yang menganggap langkah tersebut mencederai dan merusak prospek perundingan damai Israel-Palestina yang selama ini selalu dipromosikan oleh Vatikan. Selain langkah berpendirian tegas tersebut, Vatikan menunjukkan sikapnya pada isu-isu penting seperti pengalihfungsian Hagia Sophia menjadi masjid di Turki, penolakan klaim Amerika Serikat terhadap Yerusalem, hingga menandatangani perjanjian pertama dengan Palestina. Vatikan pun juga meningkatkan kunjungannya di banyak negara Timur Tengah seperti Irak, Lebanon, Turki, Uni Emirat Arab, dan serangkaian aktivitas diplomatik lain yang membawa pesan dan dampak normatif yang begitu signifikan.

Langkah Vatikan di bawah komando Paus Fransiskus tersebut ternyata membawa dampak besar dan reaksi yang beragam baik dari aktor politik negara maupun pihak internal Gereja Katolik. Selain penolakan dari Israel, diplomasi Vatikan oleh Paus Fransiskus juga dipandang terlalu

terbuka oleh pihak Gereja. Dalam mengartikulasikan pandangan politiknya, Paus Fransiskus sebagai representasi Vatikan memang berusaha untuk terus bertumpu pada netralitas. Akan tetapi, Paus Fransiskus juga tidak ragu untuk menetapkan kebijakan berani yang mewakili pandangan pribadinya. Hal tersebut terlihat melalui pandangan terbuka Paus Fransiskus terhadap isu homoseksualitas dan perceraian yang pada dasarnya berlawanan dengan keyakinan Gereja Katolik. Selain itu, Paus Fransiskus juga membawa diplomasi Vatikan menjadi lebih terbuka dan seringkali melewati protokol-protokol penting yang berlaku. Paus Fransiskus pun dalam kunjungan diplomatiknya tidak enggan untuk menegaskan presensi dan aktivitas diplomatik di lokasi dan simbol keagamaan agama lain (Reuters, 2015). Maka melalui berbagai perubahan terhadap arah diplomasi dan meningkatnya intensitas diplomasi Vatikan tersebut, terlihat adanya indikasi pengaruh idiosinkratik Paus Fransiskus dalam langkah serta sikap Vatikan di kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana idiosinkratik Paus Fransiskus memengaruhi eskalasi diplomasi Vatikan di negara-negara kawasan Timur Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Mengikuti uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dijawab dalam skripsi ini dirumuskan melalui pertanyaan bagaimana pengaruh idiosinkratik Paus Fransiskus terhadap eskalasi diplomasi Tahta Suci Vatikan di kawasan Timur Tengah?

1.3 Tinjauan Pustaka

Untuk memahami eskalasi diplomasi Tahta Suci Vatikan di kawasan Timur Tengah pada kepemimpinan Paus Fransiskus, penulis menguraikan beberapa rujukan akademis yang membahas topik tersebut. Pada tinjauan pustaka ini, peneliti meninjau empat literatur terkait dengan eskalasi diplomasi Tahta Suci Vatikan di kawasan Timur Tengah. Tinjauan literatur pertama adalah tulisan F. Michael Perko tahun 2001 yang bertajuk *Recent Vatican Diplomacy in the Middle East: An Historical Overview*. Kedua adalah tulisan Jodok Troy tahun 2018 berjudul *'The Pope's Own Hand Outstretched': Holy See Diplomacy as a Hybrid Mode of Diplomatic Agency*. Ketiga adalah tulisan Chao J. tahun 2000 berjudul *The Evolution of Vatican Diplomacy*. Keempat adalah tulisan Boris Vukićević tahun 2015 berjudul *Pope Francis and the Challenges of Inter-Civilization Diplomacy*.

Perko (2001) dalam tulisannya menjelaskan dinamika dan sejarah perjalanan diplomasi yang selalu merujuk pada upaya perbaikan situasi konflik di Timur Tengah. Tercatat, Vatikan telah memainkan perannya dalam konflik Israel-Palestina hingga invasi Israel pada Lebanon 1982. Dalam melaksanakan upaya diplomasi tersebut, Vatikan pun hadir sebagai karakter ganda dalam teladan dan kepemimpinan politik moral, serta peran pastoral untuk melindungi hak-hak Gereja di Timur Tengah. Namun perlu digarisbawahi bahwa dalam periode tersebut, gaya diplomasi Vatikan selalu didasarkan pada dogma netralitas Perjanjian Lateran 1929 yang membatasi sikap Vatikan dalam merespon suatu konflik. Dalam periode pasca Perang Dunia II, diplomasi Vatikan cenderung berkuat pada dukungan terhadap internasionalisasi tempat suci dan situs-situs religius untuk mencegah dan mengendalikan kerusakan akibat situasi konflik. Dalam hubungan diplomatik dengan Israel misalnya, Vatikan selalu memiliki konsen besar terhadap kedudukan Yerusalem sebagai tempat suci lintas agama. Selain itu, Vatikan juga menunjukkan perannya dalam konflik sipil di Lebanon sejak tahun 1976 dengan meyakini perdamaian regional sebagai satu-satunya cara untuk mewujudkan dan melindungi kepentingan Vatikan. Oleh karena itu, diplomasi Vatikan di Timur Tengah secara umum dijalankan atas kepentingan kemanusiaan dan keadilan. Melalui tulisan Perko (2001) tersebut, penulis menggunakannya sebagai penjelas sejauhmana intensitas dan pola diplomasi Vatikan di Timur Tengah dari waktu ke waktu, sehingga dapat menjadi pembandingan dengan aktivitas dan latar belakang diplomasi Vatikan di era kepemimpinan Paus Fransiskus.

Sementara itu Troy (2018) menjelaskan gaya dan perumusan *soft diplomacy* Vatikan dalam upayanya untuk membangun perdamaian. Diplomasi Vatikan sendiri memiliki kelebihan daripada diplomasi sebuah negara karena tidak terkendala proses demokrasi maupun opini publik. Oleh karena itu, diplomasi Vatikan dijalankan melalui pendekatan yang mencerminkan identitas, konteks budaya, serta pemahaman bersama. Sehingga, pendekatan tersebut berfokus pada agensi, tipe ideal, pembenaran diri, serta wacana menginterogasi praktik untuk membedakannya dengan tujuan normatif Gereja. Troy (2018) dalam tulisannya meyakini gaya diplomasi Vatikan sebagai mode hibrida keagenan yang terdiri dari empat dimensi, yakni: (1) *political modes of agency*; (2) *rational conceptions of international politics*; (3) *religious individuals*; serta (4) *substantial conceptions of international politics*. Dari keempat dimensi mode agensi ini, dijelaskan bahwa agen-agen diplomasi Vatikan, khususnya Paus memiliki peran besar dalam praktik *soft diplomacy* Vatikan. Tidak hanya Paus, para *nuncio* yang merupakan penyampai kehendak Paus turut

melakukan praktik diplomasi yang lebih luas dibanding hanya sekedar *pembawa pesan*. Pada sisi lain, muatan diplomasi Vatikan pun berbentuk *faith-based diplomacy* yang dihasilkan dari keterikatan agama dan politik. Maka melalui tulisan Troy (2018), penulis menggunakannya untuk menganalisis bagaimana model diplomasi yang dijalankan Paus Fransiskus atas nama Vatikan dalam hubungan diplomatiknya dengan negara-negara di Timur Tengah. Selain itu, dapat dipahami pula bahwa agensi individu menjadi salah satu aktor penting yang mengarahkan dan merumuskan diplomasi Vatikan.

Kemudian Chao (2000) dalam tulisannya menyebut Tahta Suci Vatikan memiliki karakter diplomasinya sendiri yang disebut *Ecclesiastical Diplomacy* yang membuat arah diplomasi Vatikan berbeda daripada diplomasi aktor negara karena tidak mengindahkan kepentingan ekonomi dan politik, melainkan hanya pada kepentingan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan. Norma ini juga didukung oleh Perjanjian Lateran 1929 yang menuntut Vatikan untuk hadir sebagai aktor netral dalam setiap konflik di komunitas global. Hal tersebut seringkali membatasi langkah diplomatik para Paus dalam mengambil sikap politik terhadap isu maupun konflik kemanusiaan. Sehingga, sikap tradisional diplomasi Vatikan cenderung normatif dan mengikuti kaidah-kaidah ideologis dalam Alkitab. Hal tersebut diikuti pula dengan intensitas diplomasi yang banyak berfokus di kawasan Eropa dan dunia Utara.

Akan tetapi dalam Vukićević (2015), disebutkan bahwa dalam periode kepemimpinan Paus Fransiskus mulai muncul sikap dan arah diplomasi yang berbeda daripada sebelumnya. Dalam melaksanakan diplomasinya, Paus Fransiskus seringkali mengabaikan protokol-protokol Gereja dan tanpa segan mengekspresikan pandangan pribadinya terhadap suatu isu. Hal tersebut tentunya menimbulkan kontradiksi di tengah posisinya sebagai kepala negara serta pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Sikap normatif yang sesuai dengan nilai Gereja Katolik dalam diplomasi tradisional Vatikan selalu menjadi pilihan terbaik dan utama (Vukićević, 2015: 71-74). Namun Paus Fransiskus sebagai representasi Vatikan hadir sebagai sosok yang tanpa segan menghormati perceraian dan kaum LGBTQ. Bahkan dalam mengekspresikan sikap politiknya, Paus Fransiskus juga tanpa segan melakukan protes fisik seperti pada protesnya yang siap untuk berlutut di jalanan apabila militer Myanmar tidak mengakhiri tindakan represif terhadap masyarakat penolak kudeta militer di Myanmar (IDNTimes, 2021). Hal tersebut tentunya menimbulkan pro dan kontra dari

berbagai pihak. Akan tetapi karakter idiosinkratik Paus Fransiskus tersebutlah yang memunculkan adanya indikasi eskalasi diplomasi Vatikan di Timur Tengah.

Maka melihat keempat literatur dan fenomena kontradiksi diplomasi yang terjadi, penelitian ini mencoba untuk mengambil sudut pandang lain dalam melihat fenomena meningkatnya diplomasi Tahta Suci Vatikan di kawasan Timur Tengah. Penulis mencoba lebih memfokuskan pada aspek internal negara, yakni aspek idiosinkratik Paus Fransiskus serta karakteristik pribadi Paus Fransiskus sebagai kepala negara yang akhirnya mendorong peningkatan presensi dan diplomasi Vatikan di salah satu kawasan mayoritas muslim terbesar di dunia, Timur Tengah.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Level Analisis Individu

Gvalia, et. al (2013) menjelaskan bahwa perilaku negara-negara kecil umumnya lebih dipengaruhi oleh dinamika internal daripada dinamika eksternal. Oleh karena itu, variabel-variabel internal seperti identitas elit politik negara lebih berpengaruh besar terhadap perilaku dan arah kebijakan luar negeri negara-negara kecil, termasuk di antaranya adalah negara Vatikan. Dalam menganalisis kebijakan luar negeri pun, Kenneth Waltz (1959) membagi analisis menjadi tiga level utama, yakni level analisis individu, level analisis negara, dan level analisis sistem. Tesis tersebut juga didukung dengan pendapat Marijke Breuning (2007) dan Laura Neack (2008) yang menyebut individual, negara, dan sistem sebagai level analisis yang dapat dipilih untuk menjelaskan kebijakan luar negeri. Maka dalam penelitian ini, penulis memilih analisis level individu untuk menganalisis topik kajian yang diambil. Level analisis individu sendiri menjadikan individu sebagai unit analisis untuk menjelaskan kebijakan luar negeri. Level analisis ini berfokus pada kepribadian, persepsi, serta peran seorang individu sebagai pengambil kebijakan. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk menganalisis kebijakan luar negeri, dalam hal ini aktivitas diplomasi, yang diambil oleh Paus Fransiskus dalam kepemimpinannya di Tahta Suci Vatikan. Penulis menganalisis Paus Fransiskus dalam sudut pandang kepribadian, persepsi, serta posisi sentralnya sebagai pengambil kebijakan.

1.4.2 Teori Idiosinkratik pada Pemimpin Politik

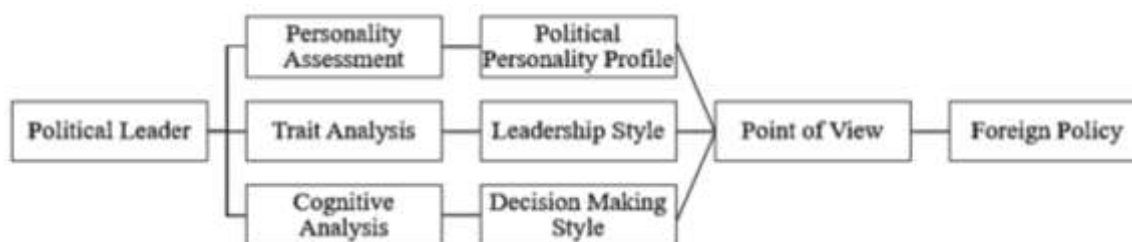
Istilah idiosinkratik secara garis besar digunakan untuk menggambarkan aspek atau identitas pada pembuat kebijakan seperti persepsi, nilai, kemampuan, hingga jejak pengalaman individu pembuat keputusan yang mampu memengaruhi proses pengambilan kebijakan. Maka dari itu pendekatan

ini seringkali dipandang sebagai level analisis paling dasar, namun begitu fundamental karena kemampuannya untuk memengaruhi jalannya sistem di tingkat nasional maupun internasional. Dalam model kajian idiosinkratik menurut Robinson dan Snyder (1965), analisis umum dilakukan dengan melihat atribut-atribut individu seperti kepribadian (*personality*), gaya kepemimpinan (*leadership style*), pengalaman (*experience*), hingga kesehatan fisik dan mental (*physical style*).

Pada proses pembuatan kebijakan pun, pada dasarnya terdapat nilai-nilai yang memengaruhi hasil akhir dari proses tersebut. Salah satu nilai yang dianggap paling berpotensi memengaruhi proses pembuatan kebijakan datang dari karakter pribadi pemimpin politik sebagai penentu dan representasi negara. Pemimpin politik dapat menjadi navigator arah diplomasi dan hubungan negara, entah cenderung agresif, pasif, maupun mendorong pada perdamaian dengan negara lain (Hermann, 1980 dalam Post, 2006: 91). Maka apabila analisis kebijakan luar negeri dikaitkan dengan pengaruh atribut kepribadian seorang individu, kajian tersebut secara umum mengaitkan ilmu psikologi sosial dengan ilmu politik (Post, 2006: 17). Oleh karena itu, kepribadian seorang pemimpin diyakini mampu memengaruhi dan menjadi refleksi dari kebijakan luar negeri yang muncul. Kepribadian seorang pemimpin akan semakin terasa dampaknya dalam situasi krisis dan ambigu yang membutuhkan keputusan dan pengambilan kebijakan yang cepat (Hermann, 2006: 208). Maka dalam hal ini, terdapat alur kerangka berpikir sederhana yang menjelaskan bagaimana kepribadian pemimpin memengaruhi pengambilan kebijakan hingga perubahan arah kebijakan yang terjadi.

Bagan I.1

Sintesis Kerangka Berpikir



Sumber: Post, Jerrold. 2006. *The Psychological Assessment of Political Leaders*,
USA: University of Michigan Press.

Melalui bagan sintesis tersebut, pengaruh idiosinkratik kepribadian pemimpin terhadap perubahan kebijakan luar negeri diuraikan melalui tiga analisis atau *assessment* utama, yakni *personality assessment*, *trait analysis*, serta *cognitive analysis* yang mengarah pada identifikasi *political personality profile*, *leadership style*, dan *decision making style*. Ketiga identifikasi tersebut akan menggambarkan *point of view* seorang pemimpin yang akhirnya membentuk perubahan kebijakan luar negeri.

1.4.2.1 Personality Assessment

Personality assessment diperlukan untuk menentukan karakter *political personality profile* seorang pemimpin dengan menganalisis perjalanan hidup pemimpin yang membentuk karakter dan sikap inti serta menemukan pola-pola tertentu dalam perilaku kepemimpinan yang berpotensi memengaruhi keputusannya dalam membuat kebijakan. Selain itu, *political personality profile* juga dibutuhkan untuk mengidentifikasi isu-isu yang berpotensi memiliki keterkaitan dengan kepribadian pemimpin (Hermann, 2006: 79). Maka dalam *personality assessment*, *political personality profile* pemimpin dapat diidentifikasi dalam empat tipe utama.

Bagan 1.2

Personality Types of Political Leader

Type 1 The Ego-Defense	Type 2 The Narcissist
Type 3 The Obsessive-Compulsive	Type 4 The Paranoid Personality

Sumber: Post, Jerrold. 2006. *The Psychological Assessment of Political Leaders*, USA: University of Michigan Press.

Berdasarkan Bagan 1.2 tipe *the ego-defense* dijelaskan sebagai karakter yang peka dalam mengidentifikasi dan memprediksi perilaku di bawah tekanan. Karakter ini memiliki ciri khas seperti menengahi dorongan batin dan dunia luar, yang memuat aspek afektif, kognitif, dan interpersonal sendiri. Lalu tipe 2 *the narcissist* cenderung bersifat egois dengan kepercayaan diri yang begitu tinggi. Karakteristik ini dianggap berpotensi membahayakan apabila ditempatkan pada posisi sentral pengambilan kebijakan. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya rasa paranoid,

sikap agresif untuk meraih tujuan pribadinya, fantasi kesuksesan yang tinggi, rasa haus akan perhatian yang konstan, rasa bangga akan keunikan pada dirinya, responsif terhadap ancaman pada harga dirinya, serta gangguan karakteristik interpersonal (Hermann, 2006: 80-83).

Sementara itu *the obsessive-compulsive* mengacu pada karakter kepribadian dengan kemampuan organisasional tinggi, penekanan pada proses rasional dan profesional, serta perhatian yang tinggi terhadap detail. Karakter ini menyukai efisiensi, keteraturan, ketertiban, dan organisasional. Namun hal tersebut malah berpotensi menghilangkan fokusnya pada gambaran besar dan kedekatan dengan aspek emosional, sehingga berpotensi menimbulkan pengambilan keputusan yang kurang optimal. Kemudian tipe 4 *the paranoid personality* merujuk pada karakteristik kepribadian yang memiliki kemauan kuat untuk mempertahankan apa yang ia percayai dan menolak inkonsistensi informasi yang berseberangan dengan *belief system* yang ia miliki, sehingga enggan untuk melakukan verifikasi (Post, 2003: 94-95).

Maka melalui pendefinisian tersebut, profil kepribadian politik Paus Fransiskus cenderung mengarah pada *the ego defense* yang mampu memprediksi dan mengidentifikasi masalah-masalah maupun perilaku meski berada di bawah tekanan. *The ego-defense* juga berusaha menengahi dorongan batin dan dunia luar, yang memuat aspek afektif, kognitif, dan interpersonal. Pendirian dan kepercayaan kuat membuat *ego-defense* cenderung menolak hal-hal yang melawan pendiriannya. Hal tersebut sejalan dengan perilaku politik dan kepemimpinan Paus Fransiskus yang secara kuat menjalankan diplomasinya di negara-negara kawasan Timur Tengah.

1.4.2.2 Trait Analysis

Mengamati pola respon dan pilihan-pilihan yang dibuat pemimpin terhadap suatu isu menjadi fokus *trait analysis* yang juga digunakan untuk menentukan *leadership style* dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Dalam menghadapi isu kenegaraan yang semakin kompleks baik dari segi birokrasi, organisasi, maupun tekanan, pemimpin politik umumnya akan mengalami dilema-dilema yang memengaruhi kebijakan. Maka untuk menghadapi dilema tersebut, pemimpin politik memunculkan *leadership style* sebagai mekanisme solusi bagi hal tersebut (Hermann, 2006: 52). *Leadership style* sendiri diuraikan dalam beberapa kodifikasi dimensi karakter yang digunakan untuk memprofilkan gaya kepemimpinan pemimpin politik.

Tabel 1.1

**Gaya Kepemimpinan menurut Respon terhadap
Informasi, Kendala dan Motivasi**

Respon terhadap Kendala	Keterbukaan pada Informasi	Motivasi	
		Fokus Masalah	Fokus Hubungan
Challenges Constraints	Closed to Informations	<i>Expansionistic</i> - Perluasan kendali pada pemerintahan, kepemimpinan, dan negara bagian	<i>Evangelistic</i> - Fokus pada upaya persuasi untuk bergabung dalam misi dan memobilisasi orang melalui pesan yang dibawa
Challenges Constraints	Open to Informations	<i>Actively Independent</i> - Fokus pada kemandirian dan kekuatan manuver pemerintahannya di tengah lingkungan eksternal yang membatasi keduanya	<i>Directive</i> - Fokus pada peningkatan reputasi negara dengan tujuan mempertahankan status dan dukungannya di pemerintahan dengan terlibat pada aktivitas internasional
Respects Constraints	Closed to Informations	<i>Incremental</i> - Fokus pada peningkatan bertahap keamanan/ekonomi negara serta menghadapi tantangan dalam upaya tersebut	<i>Influential</i> - Fokus pada peran kepemimpinan sebagai pembangun hubungan kooperatif dengan pemerintah, negara bagian, maupun pihak-pihak lain
Respects Constraints	Open to Informations	<i>Opportunistic</i> - Fokus pada aspek terpenting pada situasi terkini, mengingat tujuan yang ingin dicapai dan mempertimbangkan konstituen penting	<i>Collegial</i> - Fokus pada rekonsiliasi perbedaan dan pembangunan konsensus untuk mendapat prestige melalui akuntabilitas bersama

Sumber: Hermann, Margaret, 1980 dalam Post, Jerrold, 2006. *The Psychological Assessment of Political Leaders*, USA: University of Michigan Press.

Melalui dimensi karakter tersebut, dapat diukur bagaimana derajat bias, kecenderungan dalam pengambilan kebijakan, keterbukaan informasi, maupun motivasi-motivasi yang melatarbelakangi kepribadian dan arah pengambilan kebijakan pemimpin politik. Analisis dimensi kepribadian tersebut dapat dilakukan melalui pidato-pidato, tanggapan wawancara, maupun langkah pemimpin politik dalam mengeksekusi dan merumuskan kebijakan luar negeri. Sehingga, berbagai data tersebut dapat menunjukkan skor ciri-ciri gaya kepemimpinan seorang pemimpin politik.

Mengikuti delapan kodifikasi dimensi kepribadian tersebut, gaya kepemimpinan Paus Fransiskus cenderung mengarah pada *actively independent*. Asumsi tersebut didasarkan pada respon terhadap kendala, keterbukaan informasi, serta fokusnya yang lebih mengarah pada orientasi masalah.

Dimensi *actively independent* sendiri merujuk pada pemimpin yang secara independen melakukan manuver politik di tengah lingkungan eksternal yang membatasinya.

1.4.2.3 Cognitive Analysis

Cognitive analysis menjadi salah satu tahapan analisis individu yang menggunakan pendekatan teknik observasional dan eksperimental. Aspek yang dianalisis dalam pendekatan ini pun mencakup kompleksitas intergratif yang mencakup variabel-variabel karakter seperti konstruksi pribadi, gaya narasi, dogmatisme, independensi lapangan, hingga tingkat otoritarianisme. Maka untuk menganalisis aspek-aspek tersebut, para peneliti umumnya menggunakan analisis kepribadian dari jarak jauh melalui interpretasi wawancara hingga pidato (Post, 2006: 246).

Cognitive analysis berperan penting dalam memengaruhi pemikiran dan sikap politik pemimpin dalam pembuatan kebijakan. Gaya pengambilan kebijakan tersebut pun menjadi implikasi dari *leadership style*, sehingga gaya pengambilan kebijakan akan menggambarkan bagaimana gaya kepemimpinan pemimpin tersebut (Post, 2006: 246). Dalam menganalisis *decision making style* sendiri terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan, yakni *problem characteristic* dan *situational characteristic*. *Problem characteristic* dianalisis dengan memperhatikan masalah-masalah kompleks yang dihadapi pemimpin di tengah tugasnya sebagai pengambil kebijakan. Masalah kompleks cenderung berhubungan dengan kehidupan pribadi pemimpin seperti situasi kematian keluarga terdekat, dinamika pernikahan, kemunduran pekerjaan, hingga masalah kesehatan. Dalam menghadapi masalah tersebut, kontrol individu pemimpin diamati dan mengidentifikasi bagaimana dampaknya terhadap pola *decision making style* pemimpin (Suedfeld, et. al, 2006: 277). Kemudian *situational characteristic* merujuk pada kompleksitas dampak dari lingkungan sosial, tekanan tugas, hingga sumber stressor lain. Maka dari itu manajemen kognitif perlu dilakukan untuk menentukan strategi pemimpin dalam manajemen kecenderungan psikologis untuk menangani situasi problematis yang dihadapi (Suedfeld, et. al. 2006: 267-268).

Melalui penjelasan tersebut, gaya pengambilan keputusan Paus Fransiskus cenderung mengarah pada *situational characteristic* di mana dalam mengambil keputusan Paus Fransiskus memperhatikan situasi di sekitarnya dan turut mengidentifikasi dampak baik maupun buruk dari keputusan tersebut. Tekanan tugas serta lingkungan eksternal juga menjadi pengaruh berarti bagi proses pengambilan keputusan Paus Fransiskus. Gaya pengambilan keputusan ini juga didukung

oleh pandangan Paus Fransiskus yang berusaha meningkatkan presensi Vatikan pada isu-isu perdamaian lintas agama, sehingga mendorong pada eskalasi diplomasi di kawasan Timur Tengah.

1.5 Hipotesis

Eskalasi diplomasi Tahta Suci Vatikan di Timur Tengah dalam periode tahun 2013 hingga 2021 dipengaruhi oleh karakter idiosinkratik Paus Fransiskus sebagai Pemimpin Gereja dan Kepala Negara. Pengaruh idiosinkratik tersebut mencakup kepribadian politik, gaya kepemimpinan, serta gaya pembuatan keputusan. Maka dalam aspek tersebut, kepribadian politiknya mengarah pada tipe *ego-defense* dengan gaya kepemimpinan *actively independent*. Sementara itu gaya pembuatan keputusan Paus Fransiskus cenderung dipengaruhi oleh *situational characteristic*. Ketiga faktor idiosinkratik tersebut mengubah pola diplomasi Vatikan dan akhirnya menimbulkan eskalasi aktivitas diplomasi Vatikan di kawasan Timur Tengah. Eskalasi diplomasi itupun terjadi karena cara pandang dan keyakinan Paus Fransiskus akan nilai penting dan prioritas Timur Tengah sebagai kawasan untuk meraih tujuan nasional.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Operasionalisasi Konsep

1.6.1.1 Eskalasi Diplomasi Negara

Harold Nicolson (1950) melihat diplomasi sebagai upaya membimbing hubungan internasional melalui negosiasi dan cara yang digunakannya untuk mengelola duta besar atau perwakilan negara atau karya seninya. Pada sisi lain, Hart dan Asaf Siniver (2021) menguraikan bahwa diplomasi secara sederhana menjadi strategi dan seni politik yang dijalankan negara dengan tujuan untuk meningkatkan prioritas luar negerinya. Diplomasi pun dapat dikonstruksikan dalam lima parameter yang mencakup identitas para aktor, tujuan, mekanisme interaksi, profesi, serta keterampilan diplomasi. Hans Morgenthau sendiri melihat diplomasi negara sebagai pusat perdamaian internasional dengan potensi untuk memitigasi politik kekuasaan. Sementara itu menurut Barry Steiner (2004), upaya analisis diplomasi dapat ditelisik pada posisinya sebagai *dependent variable* melalui bagaimana praktik adaptasinya dengan kendala-kendala tertentu seperti perubahan politik, militer, hingga ekonomi yang memengaruhi arah inisiatif politik. Namun diplomasi sebagai *independent variable* diyakini sebagai faktor pendorong perdamaian dan

pencegahan perang, khususnya saat diplomasi bertendensi mencapai pengaturan kooperasi dan melawan arus persaingan.

Melalui pendefinisian tersebut, eskalasi yang kemudian terjadi pada diplomasi suatu negara salah satunya dapat didorong oleh perubahan politik maupun intensi untuk meraih tujuan yang diwujudkan melalui diplomasi. Maka secara operasional, eskalasi diplomasi dalam tulisan ini merujuk pada peningkatan faktor-faktor konstruksi diplomasi yang menjadi bagian dari *foreign policy* dalam era kepemimpinan Paus Fransiskus.

1.6.1.2 Kepribadian Politik

Kepribadian politik menurut Ishak (2016) dijelaskan sebagai disposisi dari kekuatan formal dan informal yang digunakan untuk memengaruhi atau mengontrol pihak-pihak lain. Oleh karena itu, kepribadian politik pemimpin diyakini dapat memengaruhi sikap kerja, perilaku, tingkat kepercayaan, kepuasan, hingga kinerja dari suatu keorganisasian. Sementara itu Robert Lane (2018) melihat kepribadian politik sebagai keteraturan dinamis yang bertahan lama dari rangkaian respon yang dibangkitkan oleh rangsangan bernilai politik. Untuk mengidentifikasi kepribadian sendiri, Psikolog Roger Knudson menguraikan ciri-ciri kepribadian sebagai disposisi perilaku yang stabil. Sehingga saat mempelajari kepribadian pemimpin politik, pola-pola perilaku berulang dapat menjadi acuan bagaimana karakter tersebut memengaruhi kebijakan luar negeri yang ia ambil (Neack, 2008).

Maka secara operasional, kepribadian politik dalam tulisan ini akan merujuk pada kepribadian politik Paus Fransiskus yang terbentuk dari pengalaman masa kecil hingga dewasa yang memengaruhi dan membentuk kepribadian politiknya di masa kini. Kepribadian politik itu sendiri merujuk pada disposisi perilaku yang stabil dan bertahan lama sebagai respon atas rangsangan politik. Sehingga, kepribadian politik tersebut nantinya turut menggambarkan perjalanan hidup Paus Fransiskus yang berkaitan dengan aspek-aspek tertentu dalam perilaku kepemimpinannya.

1.6.1.3 Gaya Kepemimpinan

Margaret Hermann (2006) menjelaskan gaya kepemimpinan sebagai pola atau cara pemimpin berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya diikuti dengan bagaimana mereka menyusun norma, interaksi, aturan, hingga prinsip-prinsip yang mereka gunakan untuk memandu interaksi tersebut. Gaya kepemimpinan sendiri dapat terlihat melalui respon pemimpin politik terhadap

kendala, pemrosesan informasi, serta motivasi untuk mengatasi atau bersikap pada lingkungan politik. Pada sisi lain, Newstrom dan Davis (1993) mendefinisikan gaya kepemimpinan sebagai pendekatan atau cara dalam memberikan arah, implementasi rencana, hingga memotivasi pihak-pihak lain. Gaya kepemimpinan inipun melibatkan tindakan implisit maupun eksplisit pemimpin politik yang memengaruhi pembuatan kebijakan, tujuan, hingga implementasi pemimpin dalam menjalankan tugasnya.

Operasionalisasi dari konsep tersebut pun merujuk pada gaya kepemimpinan Paus Fransiskus, khususnya terkait pola interaksi, norma, serta cara-cara yang digunakan untuk memberikan arah dan mengimplementasikan kebijakan yang telah diambil. Sehingga, gaya kepemimpinan tersebut berpotensi memengaruhi arah kebijakan, aktor-aktor politik, maupun implementasi kebijakan luar negeri.

1.6.1.4 Gaya Pengambilan Keputusan

Scott dan Bruce (1995) menjelaskan gaya pengambilan keputusan sebagai kebiasaan dan pola respon yang dipelajari yang ditujukan untuk menghadapi pilihan-pilihan maupun situasi keputusan. Pengidentifikasiannya sendiri dapat dilakukan dalam dua pendekatan yakni gaya pengambilan keputusan sebagai model karakteristik pemimpin dalam memahami dan menanggapi tugasnya sebagai pembuat keputusan serta pendekatan pola kebiasaan pada pemimpin dalam pembuatan keputusan. Maka dari itu, reaksi yang timbul atas situasi keputusan tersebut muncul tidak semata-mata karna kepribadian tetapi kebiasaan individu untuk bereaksi dengan cara tertentu. Maka operasionalisasi dari konsep gaya pembuatan tersebut akan mengarah pada keputusan pola atau kebiasaan yang ditujukan untuk menghadapi pilihan-pilihan dari Paus Fransiskus, khususnya ketika menghadapi proses perumusan kebijakan dan responnya dalam situasi keputusan.

1.6.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini akan mengangkat tipe penelitian eksplanatif dengan analisis dan penjelasan karakteristik pertanyaan yang diawali dengan kata ‘bagaimana’. Penelitian eksplanatif ini dilakukan dengan menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel dalam penelitian. Dengan demikian penelitian ini mencoba menemukan penyebab terjadinya suatu fenomena dan

berupaya untuk menguji hipotesis maupun teori. Pengujian tersebut ditujukan untuk mendukung atau menolak hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya.

Maka dari itu, penelitian ini menghadirkan dua variabel utama dalam pembahasan kasus, yakni eskalasi diplomasi Tahta Suci Vatikan serta idiosinkratik Paus Fransiskus selaku Kepala Negara yang menjadi eksekutor dan pemberi arah kebijakan luar negeri Vatikan. Sehingga, penelitian ini akan mencoba menganalisis pengaruh idiosinkratik Paus Fransiskus terhadap eskalasi aktivitas dan prioritas diplomasi Tahta Suci Vatikan di negara-negara kawasan Timur Tengah.

1.6.3 Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merujuk pada bagaimana pengaruh Paus Fransiskus terhadap arah diplomasi Vatikan serta aktivitas-aktivitas diplomasi Tahta Suci Vatikan di Timur Tengah. Maka untuk menganalisis pengaruh tersebut, jangkauan penelitian akan dimulai sejak Paus Fransiskus lahir pada 17 Desember 1936. Jangkauan penelitian tersebut berlanjut hingga tahun 2021 di mana Paus Fransiskus menjabat sebagai Pemimpin Gereja Katolik Roma serta Kepala Negara di Vatikan. Jangkauan penelitian tersebut diambil untuk mengetahui kehidupan awal atau perjalanan karir Paus Fransiskus yang mendukung data-data penelitian terkait latar belakang kehidupan yang berpotensi memengaruhi eskalasi diplomasi Vatikan di Timur Tengah.

1.6.4 Sumber Data

Sumber data yang diambil dan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder tersebut mencakup jurnal, buku, berita, serta artikel ilmiah. Selain itu, transkrip pidato dan wawancara juga akan digunakan untuk mendukung data serta informasi terkait Paus Fransiskus.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan menganalisis data dan informasi yang telah dihimpun dalam bentuk kumpulan kata maupun data bersifat kualitatif lainnya. Melalui proses reduksi, penyajian, serta interpretasi data-data tersebut kemudian dianalisis untuk ditemukan hubungan satu sama lain yang menggambarkan kejelasan.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, serta hipotesis. Selain itu, bab ini juga akan memuat metodologi penelitian yang terdiri dari operasionalisasi konsep, tipe penelitian, ruang lingkup dan jangkauan penelitian, sumber data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi pembahasan yang menjelaskan eskalasi diplomasi Vatikan di kawasan Timur Tengah. Bab ini akan menguraikan bukti-bukti serta momen penting yang menggambarkan eskalasi diplomasi Vatikan di kawasan mayoritas muslim tersebut.

Bab III berisi profil kepribadian politik Paus Fransiskus. Pada bab ini penulis melakukan *personality assessment* untuk menemukan profil kepribadian politik Paus Fransiskus yang berpengaruh pada eskalasi diplomasi Vatikan di Timur Tengah

Bab IV berisi pembahasan terkait gaya kepemimpinan Paus Fransiskus. Pada bab ini penulis melalui *trait analysis* untuk menemukan gaya kepemimpinan Paus Fransiskus dan kaitannya dengan eskalasi diplomasi Vatikan di Timur Tengah.

Bab V berisi pembahasan terkait gaya pengambilan keputusan Paus Fransiskus. Pada bab ini penulis melakukan *cognitive analysis* untuk menemukan gaya pengambilan keputusan Paus Fransiskus dan pengaruhnya terhadap eskalasi diplomasi Vatikan di Timur Tengah

Bab VI berisi kesimpulan penelitian dari bab-bab yang telah diuraikan dan dijelaskan sebelumnya.